

KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING OLEH PEMERINTAH KOTA PALU DALAM MEWUJUDUKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*

Srifridayanti¹, Yunarni², Putri Indar Dewi³
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu
Srifridayanti90@gmail.com¹, Yunarni062204@gmail.com²
Putriindardewi305@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan penanganan stunting oleh Pemerintah Kota Palu dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat pemerintah Kota Palu dalam penanganan stunting. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palu untuk menjalankan kegiatan penanganan stunting dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) membagi menjadi 2 tindakan yaitu pencegahan dan penanggulangan. Tindakan pencegahan yang diambil Pemerintah Kota Palu adalah pemberian edukasi pada ibu hamil dan balita terkait pentingnya pemenuhan gizi, serta pemberian suplemen penambah darah atau hemoglobin pada ibu hamil. Pengendalian penduduk juga merupakan salah satu langkah pencegahan yang diambil oleh Pemerintah Kota Palu dalam penanganan stunting. Sementara Pada tindakan penanggulangan, Selain pemberian makanan tambahan, pemerintah Kota Palu melakukan pelatihan dan pendampingan kepada petugas posyandu atau puskesmas agar dapat memantau langsung perkembangan anak atau balita, dapat mengelola gizi dengan baik, dan memberikan edukasi gizi yang efektif.

Kata Kunci: Kebijakan, Penanganan, Stunting, *Sustainable Development Goals* (SDGs)

ABSTRACT

This research aims to find out the policy of handling stunting by the Palu City Government in realizing the Sustainable Development Goals (SDGs) and to find out what factors hinder the Palu City government in handling stunting. The method used in this research is a qualitative approach and is descriptive, qualitative research is a research method used to research on natural object conditions, as opposed to experiments, where the researcher is the key instrument. Qualitative research aims to obtain a complete picture of a matter according to the human views studied. Qualitative research deals with ideas, perceptions, opinions or beliefs of the people studied and all of them cannot be measured by numbers. The results showed that the Palu City Government to carry out stunting handling activities in realizing the Sustainable Development Goals (SDGs) divided into 2 actions, namely prevention and control. Preventive actions taken by the Palu City Government are providing education to pregnant women and

toddlers regarding the importance of fulfilling nutrition, as well as providing blood or hemoglobin supplements to pregnant women. Population control is also one of the preventive measures taken by the Palu City Government in handling stunting. While in countermeasures, in addition to providing additional food, the government of Palu City conducted training for pregnant women and toddlers.

Keywords: *Policy, Handling, Stunting, Sustainable Development Goals (SDGs)*

PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs) hadir sebagai sebuah jawaban dari rasa kepedulian bersama untuk mencapai sebuah keadilan dan keamanan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat dunia, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang. SDGs muncul sebagai wujud dari kepedulian bersama untuk membangun tujuan global yaitu pembangunan berkelanjutan yang merupakan kewajiban bagi semua negara di dunia. *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan program pembangunan yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai agenda pembangunan global pada tahun 2030 yang bertujuan demi kemaslahatan manusia dan planet bumi. Indonesia adalah salah satu negara anggota PBB yang turut berpartisipasi dalam implementasi SDGs. SDGs terdiri atas 17 tujuan dan 169 sasaran yang ditetapkan oleh PBB dan kemudian disepakati oleh seluruh negara tanpa terkecuali. Tujuan dan sasaran tersebut mulai dilaksanakan tahun 2016 hingga 2030.

Pada dasarnya, pelaksanaan SDGs terdiri dari dana/anggaran, alih teknologi, dan pengembangan kapabilitas atau kompetensi. Konsep SDGs sendiri lahir pada Konferensi Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh PBB di Rio de Janeiro pada tahun 2012. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk mencapai tujuan bersama universal yang berkelanjutan: Lingkungan, masyarakat dan ekonomi. Demi menjaga keseimbangan ketiga aspek pembangunan tersebut, maka SDGs berpatokan pada 5 landasan utama yaitu manusia, bumi, kemakmuran, perdamaian dan kerja sama. Diantara tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ada, terdapat tiga tujuan mulia pada tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim.

Kemiskinan masih menjadi permasalahan penting dan menjadi fokus utama, selain dua capaian lainnya. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, maka disusunlah 17 tujuan global dari SDGs tersebut. Yaitu: Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*), Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*), Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (*Good Health and Well-being*), Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*), Air Bersih dan Sanitasi (*Clean Water and Sanitation*), Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*), Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (*Decent Work and Economic Growth*), Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and*

Infrastructure), . Mengurangi Kesenjangan (*Reduced Inequalities*), Keberlanjutan Kota dan Komunitas (*Sustainable Cities and Communities*), Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption and Production*), Aksi Terhadap Iklim (*Climate Action*), Kehidupan Bawah Laut (*Life Below Water*), Kehidupan di Darat (*Life on Land*), Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian (*Peace, Justice and Strong Institutions*), Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships for The Goals*).

Sehubungan dengan *sustainable development goals* (SDGs), Pemerintah Indonesia telah merancang tujuh agenda pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV 2020-2024, yaitu (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2019). Nyatanya, pembangunan SDM memiliki korelasi yang erat dengan fenomena *stunting*. *Global Nutrition Report 2016* melaporkan, bahwa prevalensi *stunting* di Indonesia menempati urutan 108 dari 132 negara yang turut berpartisipasi. Ironisnya, di wilayah Asia Tenggara, angka prevalensi *stunting* Indonesia adalah angka tertinggi kedua setelah Kamboja. Mengacu data Kemenkes tahun 2019 di Indonesia, sekitar 27,67% anak penderita *stunting* (Riset Kesehatan Dasar/Riskesdas). Sementara itu, tercatat Indonesia adalah negara dengan prevalensi *stunting* kelima terbesar diseluruh dunia. (Izwardy D, 2019). Indonesia sendiri telah memiliki regulasi untuk mengatasi persoalan *stunting*. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang mengatur penyelenggaraan upaya perbaikan gizi masyarakat meliputi arah, tujuan, dan strategi perbaikan gizi masyarakat. Tujuan perbaikan gizi adalah untuk meningkatkan mutu gizi perorangan masyarakat.

Selain regulasi di atas, Pemerintah Indonesia juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Peraturan Presiden tersebut bertujuan agar implementasi SDGs di Indonesia dilakukan secara partisipatif dengan mengajak serta melibatkan seluruh pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang bisa meningkatkan kualitas kehidupan tiap generasi. Berdasarkan pada perpres dan kebijakan pembangunan yang tertera di Bappenas, *stunting* menjadi prioritas skala nasional. Dalam konteks (SDGs), anak-anak mendapatkan pelayanan kesehatan, gizi, air minum dan sanitasi, pendidikan, pertanian, serta perlindungan sosial.

Kesehatan menjadi isu prioritas utama dalam program *Sustainable Development Goals* (SDGs) hal tersebut disebabkan kesehatan dapat mempengaruhi tingkat kualitas manusia, yang kemudian juga akan berpengaruh terhadap pengembangan potensi bangsa. (Ishatono, 2016) Komitmen negara terhadap penanganan *stunting* juga terlihat melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan

Perbaikan Gizi. regulasi tersebut menandai upaya pemerintah bersama masyarakat dan kelompok organisasi untuk berpartisipasi dalam perbaikan percepatan gizi masyarakat prioritas pada 1000 HPK. Tindak lanjut pemerintah terhadap regulasi tersebut kemudian menjadi dasar rancangan Program Pencegahan *Stunting* di 260 kabupaten/ kota di Indonesia. Program Pencegahan *Stunting* pada 260 kabupaten/ kota di Indonesia menggunakan kerangka intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dengan kelompok sasaran meliputi calon ibu, ibu yang sedang mengandung, bayi, serta balita. (TNP2K, 2017)

Hingga saat ini, Indonesia masih terus berupaya menemukan solusi atau pemecahan dari berbagai masalah yang berkaitan dengan kesehatan, salah satu diantaranya adalah persoalan *stunting*. *Stunting* adalah salah satu penyakit yang menghambat pertumbuhan anak sehingga berdampak pada kondisi fisik, mental, kecerdasan, serta pertumbuhan anak (Aryastami, 2017). *Stunting* merupakan salah satu masalah kesehatan yang telah lama dihadapi oleh Indonesia. Sampai saat ini persoalan di bidang kesehatan ini masih cukup sulit dihadapi, *stunting* merupakan kondisi dimana terjadinya kegagalan terhadap tumbuh kembang seorang anak diakibatkan kurangnya gizi kronis dalam kurun waktu yang lama. Persoalan *stunting* kini masih menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam di bidang kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir angka kejadian balita *stunting* di Indonesia mengalami penurunan. berdasarkan data Riskesdas Tahun 2018 balita *stunting* di Indonesia yaitu mencapai 30,8%. jumlah tersebut mengalami penurunan bila dilihat dari data hasil Riskesdas tahun 2013 dimana angka prevalensi balita *stunting* di Indonesia sebesar 37,2%., dan tahun 2020 sebesar 26,92%. Meskipun angka tersebut mengalami penurunan, tetapi masih dibawah target yang telah ditetapkan di tahun 2024 yaitu sebesar 14%.

Kota Palu yang merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah melakukan berbagai upaya dalam menurunkan angka *stunting*. Mengacu data hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2022, prevalensi *stunting* di Kota Palu mencapai 24,7 persen, naik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 23,9 persen pada 2021. Sementara pada tahun 2023 angka *Stunting* Kota Palu mengalami penurunan menjadi 22,1 persen. Angka prevalansi *stunting* di Kota Palu konsisten turun dari tahun 2013 sebesar 35,6 persen menjadi 24,1 persen di tahun 2018. Kota Palu merupakan kabupaten/kota terendah prevalensi *stunting*nya di Provinsi Sulawesi Tengah yang rata-rata prevalensi *stunting* tingkat provinsi mencapai 29,7 persen. Walaupun konsisten mengalami penurunan tetapi penurunan tersebut dinilai belum terlalu signifikan karena faktanya angka *stunting* yang dicapai Kota Palu saat ini belum memenuhi target nasional yaitu sebesar 14 persen pada 2024, bahkan masih jauh di atas ambang batas WHO sebesar 20 persen. Mengutip pernyataan Wakil Wali Kota Palu Reny Arniwaty Lamadjido, Terdapat beberapa indikasi penyebab terjadinya *stunting* di Palu,

diantaranya adalah kurangnya pengetahuan orang tua (Ibu) terkait pentingnya pemberian nutrisi atau gizi anak. “Pernah kami temukan, anaknya *stunting* tapi hanya dikasih minum air gula, bukannya susu formula dan makanan tambahan,” tuturnya. Beliau juga menyebut jika kasus *stunting* dipengaruhi karena kurangnya motivasi orang tua mengantar bayi dan balitanya di pos pelayanan terpadu (tutura.id, 2023)

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Palu, angka balita *stunting* di Kota Palu mencapai sebesar 1.221 balita dari total keseluruhan 22.400 balita yang ada. Secara medis, penanganan *stunting* dilakukan dengan pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) dan makanan bergizi kepada ibu hamil, begitu pun halnya perlakuan terhadap balita sasaran dengan intervensi pemenuhan cakupan gizi. Statistik E-PPGBM yang dikutip dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Palu yang menampilkan 15 kelurahan dengan angka prevalensi *stunting* tertinggi antara 2022-2023. Di Tahun 2022, terdapat 15 kelurahan yang memiliki angka *stunting* tertinggi di Kota Palu, yaitu Kelurahan Taipa (24,71), Kelurahan Mamboro Barat (20,22), Kelurahan Pantoloan Boya (17,77), Kelurahan Mamboro (14,25), dan Kelurahan Layana Indah (13,1). Selanjutnya ada Kelurahan Pengawu (11,13), kelurahan Tavanjuka (10,23), kelurahan Talise (9,9), Kelurahan Kamonji (8,61), kelurahan Tondo (7,92), Kelurahan Watusampu (7,49), Kelurahan Lolu Selatan (7,14), kelurahan Besusu Barat (7,08), kelurahan Petobo (6,71), dan kelurahan Baiya (6,06). Sedangkan pada tahun 2023 tercatat 13 kelurahan yang mengalami persentase kenaikan *stunting*, mulai dari Kelurahan Nunu (31,37), Kelurahan Tavanjuka (28,81), Kelurahan Pantoloan Boya (25), Kelurahan Pantoloan (16,1), Kelurahan Layana Indah (15,62), kelurahan Pengawu (14,71), kelurahan Baiya (13,24), Kelurahan Balaroa (11,08 persen), Kelurahan Petobo (10,63), kelurahan Talise Valangguni (9,62), kelurahan Kamonji (9,47), kelurahan Watusampu (8,94), dan kelurahan Donggala Kodi (8,91).

Berdasarkan perbandingan statistik di atas, terlihat tren peningkatan *stunting* yang cukup mengkhawatirkan. Hanya dalam kurun waktu kurang dari enam bulan saja, prevalensi *stunting* sudah berkisar antara 8,91-31,37 persen, dibanding periode setahun sebelumnya yang berkisar 6,06-24,71 persen. Artinya, setiap bulan prevalensi *stunting* naik sekitar 2,22-7,84 persen. Tren peningkatan di atas merupakan tantangan besar bagi pemerintah Kota Palu untuk mengupayakan penurunan kasus *stunting* di Kota Palu, sesuai dengan Peraturan Walikota no 15 tahun 2023 mengenai percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kota Palu maka Pemerintah perlu berintegritas dan berkomitmen penuh dalam menurunkan jumlah prevalensi *stunting* untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* (SDGs).

Mengacu pada pemaparan di atas dan mempertimbangkan fakta lapangan mengenai masih adanya tren peningkatan angka balita stunting di Kota Palu yang akan berdampak pada terhambatnya pelaksanaan Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi, sehingga kemudian jumlah balita stunting di Kota Palu dapat berkurang. dengan demikian peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan stunting di Kota Palu ini dengan judul “Implementasi kebijakan penanganan stunting oleh Pemerintah Kota Palu sebagai upaya mewujudkan percepatan pencapaian target *Sustainable development goals*.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian kualitatif, peneliti dituntut melakukan pengkajian secara sistematis terhadap permasalahan dengan panduan kerangka konseptual atau teoritis (Sholihah, 2020). penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan dalam metode penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang berkaitan dengan sebuah fenomena sosial yang terjadi (Creswell, 2018). Menurut Bogdan dan Taylor (1975) yang dikutip oleh (Moelong, 2012) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lebih lanjut dikemukakan oleh David Williams (1995) seperti yang dikutip Moleong, penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Tujuan penelitian kualitatif untuk dapat memperoleh gambaran utuh mengenai sesuatu berdasarkan pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif erat kaitannya dengan gagasan, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti, Maka dari itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara lebih dalam untuk menemukan gambaran yang jelas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **Kebijakan Penanganan Stunting di Kota Palu**

Penanganan *Stunting* memiliki peran krusial dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs). *Stunting* pada anak atau balita merupakan indikator yang merefleksikan ketahanan pangan, kesehatan, nutrisi, akses terhadap air bersih dan sanitasi, serta kesetaraan dalam sebuah masyarakat. Data dari kementerian kesehatan RI menyatakan bahwa hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di 2022. Mengutip laman badan pusat statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah, pada tahun 2023 angka Stunting

Kota Palu mengalami penurunan menjadi 22,1 persen, namun demikian penurunan tersebut masih belum signifikan karena stunting yang dicapai Kota Palu sekarang ini belum mencapai target nasional yaitu sebesar 14 persen pada 2024, bahkan masih jauh di atas ambang batas WHO sebesar 20 persen. Oleh karena itu, instansi terkait harus dapat saling berintegrasi dalam menangani *Stunting* yang ada di Kota Palu.

Pemerintah Kota Palu saat ini bersama dengan dinas kesehatan Kota Palu telah mengambil langkah-langkah nyata dalam penanganan stunting melalui intervensi-intervensi yang dilaksanakan, Mengutip laman website antaranews “Pemerintah Kota Palu mengintervensi 144 bayi berusia di bawah dua tahun (baduta) yang mengalami *stunting* atau tengkes di Ibu Kota Provinsi Sulawesi melalui pemberian paket bantuan pemenuhan gizi”(Ridwan, 2023). Hal tersebut menandakan komitmen Dinkes Kota Palu dalam menangani persoalan *Stunting* dan mengambil langkah yang komprehensif dalam mencapai hasil yang lebih baik dalam upaya penanggulangan *Stunting* di Kota Palu.

Kementerian kesehatan (Kemenkes) RI telah merancang 11 intervensi spesifik penanganan stunting, yaitu: 1) skrining anemia, 2).konsumsi tablet tambah darah (TTD) remaja putri, 3) pemeriksaan kehamilan (ANC), 4) konsumsi tablet tambah darah ibu hamil, 5) pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronik (KEK), 6) pemantauan pertumbuhan balita, 7) ASI eksklusif, 8) pemberian MPASI kaya protein hewani bagi Baduta, 9) tata laksana Balita dengan masalah gizi, 10) peningkatan cakupan dan perluasan imunisasi, 11) edukasi remaja ibu hamil dan keluarga termasuk pemukiman bebas buang air besar sembarangan (BABS) (Kemenkes, 2023). Terkait 11 intervensi spesifik oleh Kemenkes tersebut, Rochmat Jasin selaku Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palu mengatakan Baduta yang mengalami stunting dilakukan pemeriksaan gizi dan pengukuran tinggi badan.

Dalam pemantauan di lapangan, tim kesehatan dari puskesmas juga membantu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Lebih lanjut Rochmat Jasin mengatakan, selain Baduta, Dinkes Palu juga mengintervensi pemenuhan gizi kepada ibu hamil yang mengalami anemia atau hemoglobin rendah”. Untuk mengetahui penanganan *stunting* yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah kota Palu, penulis menggunakan 2 indikator yakni pencegahan dan penanggulangan. Kedua indikator tersebut ditetapkan untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh terhadap penanganan *Stunting* yang dilakukan Pemerintah dan Dinas Kesehatan sebagai upaya mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kota Palu.

Pencegahan

Pencegahan *Stunting* adalah salah satu aspek penting dalam upaya mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pencegahan adalah salah satu tahapan yang diambil oleh Dinkes untuk mengurangi

kemungkinan meningkatnya jumlah *Stunting* yang ada di Kota Palu. Tujuan pokoknya adalah mengidentifikasi risiko, meminimalisir faktor-faktor pemicu, atau mengambil tindakan preventif agar dapat menghindari atau mengurangi dampak negatif yang muncul. Dinas kesehatan Palu dalam menangani angka *Stunting* yang ada di Palu telah melakukan kerjasama dengan pemerintah kelurahan, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga (TP-PKK), serta kader posyandu dan puskesmas yang ada di seluruh Kota Palu. (TP-PKK), puskesmas serta kader posyandu adalah tempat yang sangat efektif untuk bisa berhubungan langsung dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak di wilayah Palu. Posyandu dan Puskesmas memiliki peran krusial dalam pemantauan perkembangan anak-anak, pemberian layanan gizi, dan dalam memberikan edukasi gizi kepada ibu-ibu.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Ia mengemukakan, “Pemerintah kelurahan, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga (TP-PKK), kader posyandu, termasuk bhabinsa dan bhabinkamtibmas serta pemangku kepentingan lainnya secara bersama melakukan kolaborasi dalam melaksanakan program pencegahan tersebut. Lebih lanjut disampaikan, anak yang dinyatakan telah pulih dari *stunting* tetap dipantau oleh tim kesehatan melalui puskesmas di wilayah masing-masing. Pemantauan dilakukan secara berkala setiap minggu, per bulan sampai per tiga bulan, hal ini bertujuan untuk melihat peningkatan pertumbuhan anak, supaya mereka yang dinyatakan telah pulih dari *stunting* tidak lagi terkena gangguan gizi kronis dan yang terkena *stunting* bisa secepatnya pulih”.

Salah satu aksi pencegahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palu dalam rangka penanganan persoalan *stunting* adalah pemberian suplemen tablet peningkat hemoglobin bagi remaja dan ibu hamil. Dinas Kesehatan secara berkala menyuplai suplemen gizi dan vitamin kepada anak-anak dan ibu hamil yang membutuhkan. “Bentuk intervensi dilakukan terhadap ibu hamil dengan usia kandungan enam bulan sebelum persalinan melalui pemberian vitamin, tablet tambah darah, susu, telur ayam, daging ayam beras jenis fortivit supaya asupan gizinya terpenuhi”. Pemberian suplemen tablet peningkat hemoglobin untuk remaja dan ibu hamil adalah langkah strategis dalam mencegah *stunting*. Suplemen tablet tambah darah khususnya yang mengandung zat besi dan asam folat, dapat membantu meningkatkan kadar hemoglobin pada ibu hamil dan remaja. Hal tersebut dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan janin serta juga dapat mencegah risiko kelahiran prematur. Dengan memastikan asupan darah yang tercukupi, maka risiko *stunting* dapat dicegah sejak dini. Intervensi-intervensi tersebut menandakan keseriusan pemerintah Kota Palu dalam mengatasi *stunting* demi tercapainya (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Keberlanjutan.

Bentuk pencegahan lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu yaitu dengan melakukan pengendalian penduduk. pengendalian penduduk menjadi salah satu

prioritas yang ditempuh dalam melakukan pencegahan *stunting*. Pengendalian penduduk tersebut dilakukan secara kolaboratif melalui program Keluarga Berencana yang dikolaborasikan dengan sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Hingga saat ini pemerintah telah menyalurkan stimulus pangan penanganan *stunting* kepada keluarga sasaran. Program tersebut secara berkala dilakukan selama enam bulan guna peningkatan gizi balita dan ibu hamil. pencegahan *Stunting* di Kota Palu oleh Pemerintah sudah memperlihatkan komitmen yang besar. Perhatian dari pemerintah Kota Palu terus menerus diupayakan dengan cara memberikan gizi kepada anak-anak dan pengetahuan yang cukup bagi ibu hamil dan ibu balita agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Sehingga dapat memajukan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia khususnya di Kota Palu.

Penanggulangan

Penanggulangan merupakan sebuah cara, proses, atau tindakan menanggulangi, mengurangi resiko atau kerusakan yang telah terjadi dari sebuah situasi tertentu. Dengan kata lain penanggulangan adalah respon terhadap situasi yang telah ada yang bertujuan untuk meminimalisir kerugian atau mengurangi efek negatif dari sebuah situasi. Dalam konteks *Stunting* penanggulangan yang diharapkan adalah dengan menekan angka *Stunting* dan upaya meminimalisir dampak dari kasus angka *Stunting*.

Berdasarkan hasil pengamatan, penulis mengidentifikasi langkah-langkah penanggulangan *stunting* yang ditempuh oleh pemerintah dan Dinkes kota Palu yaitu dengan memberikan makanan tambahan kepada anak-anak yang terindikasi mengalami *stunting*. Mengutip pernyataan Wakil Wali Kota Palu Reny A. Lamadjido "Makanan tambahan penting sekali bagi tumbuh kembang anak, dan tentunya kami harapkan para orang tua dapat memperhatikan terkait kebutuhan gizi anak sehingga tumbuh kembangnya semakin baik (Palopo, 2023). Selain pemberian makanan tambahan, pemerintah Kota Palu melakukan Inovasi melalui program OCEHAN DAHSAT (Optimalisasi Pencegahan *Stunting* melalui Program Dapur Sehat atasi *Stunting*). Dalam program tersebut pemerintah memberikan Pelatihan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Olahan Lokal. Kegiatan pelatihan tersebut rutin dilaksanakan sebulan dua kali.

Kegiatan tersebut bisa digunakan dengan baik oleh masyarakat. Sebab masyarakat tidak hanya mendapatkan makanan bergizi untuk anak-anaknya, tetapi juga informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan *Stunting*. Adanya Pelatihan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Olahan Lokal tersebut merupakan langkah konkret Pemerintah kota Palu dalam menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak yang berisiko *Stunting*.

Pemberian pelatihan atau pendampingan bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat khususnya yang bersentuhan langsung dengan remaja dan ibu hamil seperti

petugas posyandu atau puskesmas dapat memantau langsung perkembangan anak atau balita, mengelola gizi dengan baik, dan memberikan edukasi gizi yang efektif kepada ibu hamil dan keluarga. Dengan kata lain, pelatihan atau pendampingan bukan hanya meningkatkan pengetahuan mereka, tetapi juga menyiapkan mereka dengan *skill* serta alat yang diperlukan sehingga dapat mengidentifikasi, mencegah, dan menanggulangi permasalahan *Stunting*. Hal tersebut dinilai dapat berkontribusi terhadap upaya penanggulangan *Stunting* serta dapat membantu anak-anak untuk tumbuh dan berkembang lebih optimal. Pelatihan atau pendampingan merupakan salah satu diantara strategi nasional untuk mengatasi *Stunting*. Strategi melibatkan beberapa pendekatan yang bervariasi. Pendekatan ini mencakup intervensi gizi yang terfokus pada 1000 hari pertama kehidupan anak, upaya yang peka terhadap masalah gizi, serta perubahan lingkungan sosial dan ekonomi untuk mencapai kesetaraan gizi yang lebih baik. Semua upaya tersebut bertujuan untuk mencegah dan mengurangi *stunting*, khususnya pada anak, dengan perhatian khusus pada tahun-tahun pertama kehidupannya.

Dinas Kesehatan Palu mengambil langkah penanggulangan *Stunting* dengan memberikan pelatihan dan pendampingan yang bertujuan memberikan pemahaman kepada petugas posyandu/puskesmas serta program Pemberian makanan Tambahan (PMT) untuk memberikan gizi yang tepat pada masyarakat yang terdampak *Stunting*. Langkah tersebut harus diimplementasikan secara berkesinambungan sehingga dapat menekan angka *Stunting* yang ada di Kota Palu. Tujuan pelaksanaan Pemberian Makanan tambahan pada anak adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi meliputi protein, lemak sehat, karbohidrat kompleks, vitamin, dan mineral. Langkah ini diarahkan pada memberikan efek positif guna menanggulangi kejadian *stunting*. (News, 2023)

Langkah yang diambil Dinas Kesehatan Palu dalam Penanganan *Stunting* sebagai upaya dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah dengan mengambil tindakan pencegahan dan penanggulangan. Langkah pencegahan untuk menghentikan penyebab terjadinya *Stunting* seperti memberikan pemahaman kepada ibu-ibu dan terus memberikan suplemen gizi kepada bayi dan balita. Tindakan penanggulangan yang diambil adalah memberikan pelatihan dan pendampingan agar petugas yang ada di posyandu atau puskesmas bisa mengantisipasi dan mewaspadai terhadap pertumbuhan jumlah *Stunting* serta dapat memberikan makanan tambahan kepada masyarakat yang terdeteksi *Stunting* agar dapat berangsur-angsur membaik. Secara sederhana dapat disimpulkan penanganan *Stunting* oleh Pemerintah Kota Palu adalah dengan menghentikan atau mencegah penyebab awal dan memulihkan dampak *stunting* yang telah terjadi.

Faktor Penghambat Penanganan *Stunting* Sebagai upaya Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Dalam setiap kebijakan yang telah dirancang, pelaksanaannya selalu saja menemui hambatan, sekalipun kebijakan-kebijakan tersebut telah disusun secara baik. Berdasarkan pengamatan yang penulis temukan, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi faktor yang menghambat penanganan *Stunting* dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kota Palu. Penduduk miskin adalah orang yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat kemiskinan. Indikator tersebut merepresentasikan berapa jumlah pengeluaran minimum yang harus dikeluarkan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok minimum (makanan dan nonmakanan). Dengan demikian, masyarakat yang pengeluarannya di bawah standar tersebut masuk kategori miskin, sedangkan yang pengeluarannya setara atau lebih tinggi tidak masuk kategori miskin. Setiap tahun, garis kemiskinan meningkat.

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, menunjukkan, garis kemiskinan per Maret 2024 sudah mencapai Rp 582.932 per kapita per bulan. Angka itu meningkat 5,9 persen dibandingkan garis kemiskinan Maret 2023 sebesar Rp 550.458 per kapita per bulan (Statistik, 2024). Meskipun garis Kemiskinan Meningkat, Jumlah penduduk Miskin di Indonesia Per Maret 2024 mengalami Penurunan. Tercatat sebesar 25,22 juta penduduk miskin di Indonesia. menurun 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 dan menurun 1,14 juta orang terhadap September 2022. Rasionya setara dengan 9,03% dari total penduduk secara nasional. Meski menurun, angka Kemiskinan di Indonesia harus terus bisa ditekan sehingga tujuan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) bisa tercapai.

Berdasarkan laporan, persentase penduduk miskin Kota Palu turun menjadi 6,56 persen, angka tersebut meningkat menjadi 26,83 ribu orang dibanding tahun sebelumnya. Mengacu Laporan Kepala BPS Kota Palu, Dalam prosentase jumlah penduduk miskin 2021 mengalami kenaikan yang tinggi sebesar 7,17 persen, di tahun 2022 turun 6,63 dan tahun 2024 kembali turun 6,56 persen. Walaupun presentase kemiskinan di Kota Palu mengalami penurunan, namun angka tersebut tidak terlalu signifikan. Oleh sebab itu, persoalan kemiskinan harus segera ditangani dengan serius sebab jika tidak, akan menimbulkan persoalan-persoalan baru seperti masalah *stunting*, Tingkat kesejahteraan masyarakat yang kurang akan mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk bisa memenuhi kebutuhan gizi yang dibutuhkan untuk bayi dan ibu hamil.

Mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan merupakan diantara tujuan dari program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang terdapat pada point 1 dan 3. Mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan merupakan langkah krusial dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang dimana

setiap masyarakat akan mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses dari segi kesehatan. Kemiskinan juga menjadi salah satu penyebab *Stunting* dimana masyarakat miskin memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan. Penanganan *Stunting* tidak akan dapat berjalan dengan optimal jika permasalahan kemiskinan belum dapat dituntaskan. Sebanyak apapun bantuan dan program yang diberikan pemerintah kepada korban *Stunting* tidak akan berpengaruh secara signifikan, hal ini dikarenakan bantuan dari pemerintah hanya bersifat sementara sedangkan pemenuhan gizi harus dijalankan secara konsisten.

Faktor kemiskinan bukan satu-satunya yang menjadi faktor penghambat penanganan stunting di Kota Palu, program intervensi spesifik juga menjadi faktor penghambat penanganan stunting. Berdasarkan pengamatan yang penulis temukan, diantara 11 program intervensi spesifik yang ada, program yang masih menjadi penghambat dan belum optimal yaitu pemeriksaan kesehatan kandungan pada ibu hamil. Kurangnya edukasi ibu hamil menyebabkan masih banyak ibu hamil abai terhadap kondisi kandungannya. Padahal, Pemeriksaan kesehatan kandungan pada ibu hamil merupakan langkah awal yang sangat penting dalam mencegah *stunting* sejak masih dalam kandungan. Dengan memperhatikan kondisi ibu dan memberikan asupan gizi yang baik, pemerintah dapat mencegah dan memitigasi resiko stunting sejak dini sehingga dapat mempercepat penanganan *stunting* dimasa mendatang.

SIMPULAN

Penanganan *Stunting* oleh Pemerintah Kota Palu dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dilaksanakan dengan dua jenis tindakan yaitu pencegahan dan penanggulangan. Pencegahan bertujuan untuk menghentikan sumber atau penyebab terjadinya *Stunting*, adapun langkah yang diambil Pemerintah Kota Palu adalah pemberian edukasi pada ibu hamil dan ibu balita terkait pentingnya pemenuhan gizi, serta pemberian suplemen penambah darah atau hemoglobin pada ibu hamil. Pengendalian penduduk juga merupakan salah satu langkah pencegahan yang diambil oleh Pemerintah Kota Palu dalam penanganan stunting. Sementara Pada tindakan penanggulangan, Selain pemberian makanan tambahan, pemerintah Kota Palu melakukan pelatihan dan pendampingan kepada petugas posyandu atau puskesmas agar dapat memantau langsung perkembangan anak atau balita, mengelola gizi dengan baik, dan memberikan edukasi gizi yang efektif kepada ibu hamil dan keluarga.

Faktor penghambat Pemerintah Kota Palu dalam penanganan *Stunting* demi mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah faktor kesejahteraan dan kemiskinan yang kemudian membuat sebagian keluarga kesulitan mendapatkan makanan yang bergizi karena kemampuan ekonominya lemah sehingga asupan gizi yang dibutuhkan tidak dapat terpenuhi. Program intervensi yang belum optimal diimplementasikan, pemeriksaan kesehatan kandungan pada ibu hamil. Pemeriksaan

kesehatan kandungan pada ibu hamil merupakan langkah pertama untuk mencegah *stunting* sejak masih dalam kandungan dengan memperhatikan kondisi ibu dan memberikan asupan gizi yang baik dapat mencegah dan memitigasi resiko *stunting* sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryastami, N. K. (2017). Kajian dan kebijakan penanggulangan masalah gizi *stunting* di Indonesia . *Kajian Dan Kebijakan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting Di Indonesia .*, 233–240.
- Creswell, J. W. (2018). *research design: qualitative,quantitave,and mixed methods approaches*. SAGE publications,inc.
- Ishatono, a. S. (2016). Sustainable Development Goals (Sdgs) dan pengentasan kemiskinan. *Sustainable Development Goals (Sdgs) Dan Pengentasan Kemiskinan*, 6(2), 154–272.
- Izwardy D. (2019). The Strategy and policy to involve property in Indonesia. *The Strategy and Policy to Involve Property in Indonesia*, 2(2), 41–52.
- Kemenkes. (2023). *11 Intervensi Spesifik Atasi Stunting Telah Dilaksanakan di Daerah*. www.kemenkes.go.id.
- Moelong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian kualitatif*. Remaja Rosdikarya.
- News, A. (2023). *Pemkot Palu intervensi 144 baduta stunting lewat pemenuhan gizi*.
- Palopo, J. (2023). *Angka Kasus Stunting di Kota Palu Capai 24 Persen, Apa yang Dilakukan Pemerintah?* Jurnalpalopo.com.
- Ridwan, M. (2023). *Pemkot Palu intervensi 144 baduta stunting lewat pemenuhan gizi*. AntaraNews.
- Sholihah, Q. (2020). *Pengantar Metode Penelitian*. UB Press.
- Statistik, B. P. (2024). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen*. Bps.go.id.
- TNP2K. (2017). Kabupaten/Kota untuk intervensi anak kerdil (*stunting*). In *100 Kabupaten/Kota Prioritas untuj Intervensi Anak Kerdil (Stunting)* (Vol. 1, pp. 1–367).
- tutura.id. (2023). *Tren kasus stunting di Kota Palu; 13 kelurahan jeblok hanya dalam empat bulan*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

<https://sulteng.bps.go.id/indicator/30/270/1/prevalensi-status-gizi-balita-menurut-kabupaten-kota-.html>